

Argumen Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam

M. Hamdan^{*1}, Su'aidi², Minnah el Widdah², Fathul Anwar¹, Sahroni¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

²UIN STS Jambi, Indonesia

Email: mhamdan49@guru.sd.belajar.id*

Abstrak

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter generasi yang berakhlak mulia, kompeten, dan siap menghadapi persaingan global. Tulisan ini mengkaji urgensi pengembangan kebijakan pendidikan Islam, termasuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi, penguatan identitas keislaman, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Beberapa strategi penting dikemukakan, seperti pengembangan kurikulum yang integratif, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Dampak positif dari pengembangan kebijakan ini meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan karakter Islami, dan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Dengan kebijakan yang terus diperbarui, pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan berdaya saing.

Kata Kunci: Argumen; Kebijakan; Pendidikan

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, kebijakan pendidikan Islam memegang peran strategis dalam membentuk karakter generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan keimanan yang kuat.¹ Pendidikan Islam di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak generasi yang mampu bersaing di kancah global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai keislamannya. Namun, untuk mencapai tujuan ini, kebijakan pendidikan Islam perlu

¹ Ardiansyah, Minnah El Widdah, and Su'aidi, 'Argumen Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 2.1 (2024), 84–93 <<https://doi.org/10.61104/jq.v1i2.135>>.

terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman² serta kebutuhan masyarakat modern.

Kebijakan pendidikan Islam yang adaptif dan responsif tidak hanya diperlukan untuk menjaga relevansi sistem pendidikan terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi, tetapi juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Permasalahan internal, seperti kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan, kurangnya inovasi dalam metode pengajaran, dan keterbatasan infrastruktur, menjadi tantangan yang harus diatasi melalui kebijakan yang tepat. Di sisi lain, pengaruh eksternal seperti derasnya arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta isu-isu kontemporer seperti radikalisme dan degradasi moral, turut menuntut adanya kebijakan pendidikan Islam yang mampu menjaga esensi ajaran Islam sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pentingnya pengembangan kebijakan pendidikan Islam juga berkaitan dengan tujuan untuk menciptakan generasi Muslim yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini mencakup pembentukan sistem pendidikan yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan nilai agama, tetapi juga sebagai wahana untuk memperkuat ketahanan budaya dan identitas keislaman di tengah gempuran budaya global.

Argumen untuk mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang berkelanjutan juga bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan keterampilan abad ke-21.³ Pendidikan yang berbasis keislaman harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi individu yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, pendidikan Islam dapat menciptakan lulusan yang berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, tanpa kehilangan esensi ajaran Islam.

² haris, 'Kebijakan Pendidikan Islam', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7.November (1967), 14–25.

³ Hj Jumira Warlizasusi and others, *Penerbit Buku Literasiologi Kerja Sama Dengan Pascasarjana IAIN Curup Alamat Penerbit <[www:http://literasikitaindonesia.com](http://literasikitaindonesia.com)>*.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji argumen-argumen utama dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam di era modern. Penulisan ini akan menyoroti aspek-aspek penting yang melandasi urgensi pengembangan kebijakan tersebut, mulai dari adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya, penguatan identitas keislaman, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan Islam.⁴ Diharapkan, kajian ini dapat memberikan pandangan baru bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan Islam dalam menyusun kebijakan yang relevan, adaptif, dan berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Metode ini dipilih karena topik yang diangkat bersifat konseptual, teoritis, dan analitis, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Fokus utama penelitian ini adalah menggali, menganalisis, dan menyusun argumen akademik mengenai pentingnya dan arah pengembangan kebijakan pendidikan Islam berdasarkan pemikiran ilmiah yang sudah ada.

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data dikumpulkan dari berbagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, seperti buku-buku kajian pendidikan Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, disertasi, tesis, prosiding seminar, dan dokumen kebijakan publik terkait pendidikan Islam. Di samping itu, literatur klasik Islam yang memuat prinsip-prinsip pendidikan dari para pemikir muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan lainnya, juga dijadikan sebagai referensi utama untuk memperkuat dasar normatif dan historis dari argumen-argumen yang dibangun dalam penelitian ini.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami isi pesan dalam dokumen atau teks yang ditelaah. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, gagasan kunci, dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan

⁴ Nasrullah Djamil, Khairunnas Rajab, and Helmiati Helmiati, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Negara Yang Dilanda Konflik: Studi Kasus Di Pattani Thailand', *Jurnal EL-RIYASAH*, 12.2 (2022), 171 <<https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.15522>>.

kebijakan pendidikan Islam. Kemudian dilakukan sintesis pemikiran antar sumber untuk membangun argumentasi yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan reflektif-kritis. Deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana kebijakan pendidikan Islam telah berkembang, baik secara historis maupun kontekstual. Sementara itu, pendekatan reflektif-kritis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut relevan dengan nilai-nilai dasar pendidikan Islam dan menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memberikan dasar argumentatif bagi pentingnya pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai.

Melalui metode kepustakaan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk gagasan konseptual yang kuat untuk pengembangan kebijakan pendidikan Islam. Artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai refleksi teoretis, tetapi juga sebagai tawaran pemikiran alternatif yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan Islam yang lebih visioner dan kontekstual di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Dan Argumen Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam merupakan kebutuhan yang mendesak di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi terjadi dengan sangat cepat, dan pendidikan Islam perlu mengembangkan kebijakan yang relevan untuk menanggapi perubahan ini. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga mendidik generasi muda yang berkarakter Islami, memiliki moral yang kuat, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dan terus berkembang agar dapat mencetak generasi yang berkompeten dan berakhlak mulia.

1. Adaptasi terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi

Seiring dengan perkembangan teknologi, pendidikan global telah mengalami perubahan signifikan dalam metode pengajaran, pendekatan kurikulum, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pendidikan Islam harus mampu mengadopsi teknologi dalam sistem pendidikannya, seperti penggunaan platform digital

untuk pembelajaran, aplikasi berbasis teknologi dalam proses evaluasi, dan penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi. Selain itu, peserta didik di lembaga pendidikan Islam juga perlu diajarkan keterampilan teknologi informasi dan literasi digital untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin menuntut keterampilan digital.

Di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menuntut pendidikan Islam untuk lebih adaptif dalam mencetak lulusan yang memiliki pemahaman terhadap kondisi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi nyata. Generasi muda saat ini dihadapkan pada pengaruh budaya yang beragam dan kadang berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus memiliki kebijakan yang mampu memberikan pondasi nilai yang kuat agar generasi muda tetap memiliki pegangan yang kokoh, sehingga mereka dapat memilah nilai-nilai positif dari arus globalisasi.

2. Penguatan Identitas Keislaman di Tengah Globalisasi

Dalam konteks globalisasi, generasi muda Muslim semakin mudah terpapar oleh budaya luar yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pengaruh media massa, sosial media, dan informasi global menjadi sangat kuat sehingga tanpa disadari mampu mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan bahkan keyakinan mereka. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus dirancang untuk membekali peserta didik dengan pemahaman agama yang mendalam serta karakter keislaman yang kuat.⁵

Penguatan identitas keislaman ini tidak hanya sebatas pada pemahaman ajaran agama, tetapi juga mencakup pembentukan karakter Islami yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan pola pikir sehari-hari. Pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak generasi yang bangga dengan identitas keislamannya, namun tetap terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam perlu difokuskan pada penanaman nilai-nilai akhlak mulia, toleransi, serta pemahaman yang moderat terhadap ajaran Islam agar generasi muda Muslim dapat menghadapi berbagai tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas keislamannya.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Islam

Kualitas sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik, sangat memengaruhi keberhasilan pendidikan Islam. Tenaga pendidik di lembaga pendidikan Islam perlu

⁵ Muhamad Nuryasin and Margono Mitrohardjono, 'Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam*, 4.2 (2019), 77–84 <<https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.2.77-84>>.

memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam hal penguasaan materi ajar, metode pengajaran, maupun kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap proses pembelajaran. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mencakup program peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik, termasuk pelatihan berkelanjutan, program sertifikasi, dan peningkatan kualifikasi akademik.

Di samping itu, pendidikan Islam juga harus didukung dengan pengembangan infrastruktur dan sarana pembelajaran yang memadai. Banyak lembaga pendidikan Islam di daerah yang masih kekurangan fasilitas dan teknologi pendukung pembelajaran. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses pembelajaran tidak dapat berjalan optimal, dan peserta didik tidak dapat merasakan manfaat dari pendidikan Islam secara penuh. Kebijakan pendidikan Islam yang baik harus memperhatikan aspek-aspek ini agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan berkualitas.

4. Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dengan Keterampilan Abad ke-21

Era informasi dan globalisasi menuntut generasi muda untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital menjadi sangat penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan keterampilan ini, sehingga lulusan lembaga pendidikan Islam mampu bersaing di dunia modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.⁶

Integrasi ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum serta memberikan pembelajaran yang berbasis pada proyek atau pemecahan masalah. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif sekaligus mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan pendidikan Islam harus mendukung penerapan metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif untuk mencapai tujuan ini.

5. Membangun Sistem Kebijakan yang Berkelanjutan

Kebijakan pendidikan Islam tidak bisa hanya bersifat sementara atau parsial; ia harus dibangun dengan landasan yang kuat dan bersifat berkelanjutan. Pendidikan Islam

⁶ Moh. Rifa'i, 'Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Era Otonomi Daerah', *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.1 (2017), 99–114 <<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i1.31>>.

yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang dirancang untuk jangka panjang dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Islam.

Kebijakan pendidikan Islam yang berkelanjutan harus didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di setiap level. Dengan adanya data yang akurat dan penelitian yang mendalam, kebijakan pendidikan Islam dapat dirumuskan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan pendidikan Islam yang berkelanjutan juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan para ahli pendidikan, agar hasil kebijakan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

6. Meningkatkan Kontribusi Pendidikan Islam terhadap Pembangunan Nasional

Kebijakan pendidikan Islam yang tepat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Pendidikan Islam dapat berperan dalam pembentukan masyarakat yang memiliki karakter dan moralitas tinggi, yang merupakan fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan kebijakan yang mendukung pendidikan karakter dan akhlak mulia, pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi yang produktif, jujur, dan berkomitmen terhadap kemajuan masyarakat.

Selain itu, pendidikan Islam yang berkualitas dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik sosial. Pendidikan yang baik akan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana serta anggota masyarakat yang bertanggung jawab.⁷ Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendukung peran pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

⁷ Muhammad Sholeh Hoddin, 'Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14.1 (2020), 15.

B. Strategi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam membutuhkan pendekatan strategis yang berkelanjutan agar dapat mengatasi tantangan internal dan eksternal yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di era globalisasi. Strategi pengembangan kebijakan ini perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, pengintegrasian teknologi, pengembangan kapasitas tenaga pendidik, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam:

1. Pengembangan Kurikulum yang Integratif dan Relevan dengan Perkembangan Zaman

Kurikulum merupakan inti dari pendidikan yang memengaruhi proses belajar mengajar serta hasil yang diharapkan dari peserta didik. Untuk itu, pengembangan kurikulum pendidikan Islam perlu dilakukan dengan pendekatan yang integratif dan kontekstual. Artinya, kurikulum harus memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pengintegrasian kurikulum ini penting agar pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan dunia kerja.

Pendekatan integratif juga mencakup pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan aspek keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan kolaborasi. Dengan demikian, peserta didik di lembaga pendidikan Islam tidak hanya memiliki pemahaman agama yang baik tetapi juga mampu bersaing di era globalisasi. Penyusunan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman ini perlu melibatkan pakar pendidikan, ulama, dan tenaga pendidik agar dapat menghasilkan kurikulum yang holistik dan berdaya saing.

2. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik adalah kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Oleh karena itu, strategi pengembangan kebijakan pendidikan Islam harus mencakup program peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang

berkelanjutan, seperti pelatihan metode pengajaran modern, pengembangan keterampilan teknologi, serta pemahaman nilai-nilai Islam yang mendalam.

Program pelatihan ini dapat dilakukan secara berkala agar tenaga pendidik selalu siap menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan. Selain pelatihan, tenaga pendidik juga perlu difasilitasi untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dan program peningkatan kualifikasi akademik.⁸ Dengan peningkatan kompetensi ini, tenaga pendidik diharapkan dapat lebih efektif dalam mengajar, mampu menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap materi yang diajarkan, dan memiliki kemampuan untuk mendidik generasi yang siap menghadapi berbagai tantangan.

3. Penggunaan Teknologi untuk Mendukung Pembelajaran yang Efektif

Teknologi saat ini menjadi salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pendidikan Islam. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya mempermudah proses penyampaian materi tetapi juga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara interaktif dan mendalam. Oleh karena itu, strategi pengembangan kebijakan pendidikan Islam harus mencakup penggunaan teknologi secara optimal.

Teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek pembelajaran, seperti penggunaan platform e-learning, aplikasi pembelajaran berbasis mobile, dan media sosial sebagai sarana diskusi dan berbagi pengetahuan. Penggunaan teknologi juga membuka kesempatan bagi pendidikan Islam untuk lebih mudah diakses oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil. Pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memungkinkan peserta didik untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain itu, teknologi juga dapat digunakan dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, seperti dalam sistem administrasi, evaluasi kinerja, dan komunikasi dengan orang tua. Dengan manajemen berbasis teknologi, lembaga pendidikan Islam dapat lebih efisien dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

⁸ Pengembangan Kurikulum and Pendidikan Isla, 'Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat 1', *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.2 (2022), 97–111.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, strategi pengembangan kebijakan pendidikan Islam harus mencakup program peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Sarana dan prasarana ini sangat penting dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan kondusif, terutama dalam bidang-bidang yang membutuhkan eksperimen dan praktek.

Banyak lembaga pendidikan Islam yang masih kekurangan fasilitas dasar yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu bekerja sama dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi lembaga pendidikan Islam. Penyediaan fasilitas ini tidak hanya berfokus pada bangunan fisik, tetapi juga pada ketersediaan media dan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam.⁹ Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan lebih baik dan peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang maksimal.

5. Kolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan

Strategi pengembangan kebijakan pendidikan Islam tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, lembaga swasta, dan organisasi keagamaan, menjadi sangat penting. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengumpulkan sumber daya, ide, dan dukungan yang diperlukan dalam pengembangan pendidikan Islam.

Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan regulasi dan pendanaan yang memadai, sementara lembaga swasta dapat memberikan dukungan dalam bentuk sponsor atau kerja sama program. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan Islam, terutama dalam memberikan lingkungan

⁹ Alisyah Pitri, Hapzi Ali, and Kasful Anwar Us, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan)', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2.1 (2022), 23–40 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854>>.

yang kondusif bagi pembelajaran agama.¹⁰ Dengan adanya kolaborasi yang baik, pendidikan Islam dapat lebih berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional juga dapat membuka peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas melalui pertukaran program, studi banding, atau bantuan teknis. Hal ini memungkinkan pendidikan Islam di Indonesia untuk belajar dari praktik-praktik terbaik di negara lain dan mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal.

6. Pengembangan Sistem Evaluasi dan Penilaian yang Terstruktur

Evaluasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam. Evaluasi yang terstruktur akan memberikan gambaran mengenai efektivitas program pendidikan serta memungkinkan pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pendidikan Islam perlu mencakup sistem evaluasi yang komprehensif, yang mencakup penilaian terhadap kurikulum, kualitas pengajaran, serta pencapaian peserta didik.

Sistem evaluasi yang baik harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Selain itu, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran, seperti keterlibatan peserta didik, kualitas interaksi antara guru dan siswa, serta ketercapaian tujuan pendidikan Islam. Dengan adanya sistem evaluasi yang terstruktur, lembaga pendidikan Islam dapat lebih responsif dalam menghadapi tantangan dan dapat terus meningkatkan kualitasnya.

7. Penguatan Manajemen dan Kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam

Kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang baik sangat diperlukan dalam menjalankan kebijakan pendidikan Islam yang efektif. Oleh karena itu, penguatan manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan kebijakan. Kepemimpinan yang efektif dapat membantu lembaga pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan, mengelola sumber daya dengan efisien, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran.

¹⁰ Nadhif Muhammad Mumtaz, 'Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.2 (2022), 414 <file:///E:/Kebijakan Pendidikan/kebijakan pendidikan menurut KH. Zenal Arifin.pdf>.

Penguatan manajemen ini dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah atau pengelola lembaga pendidikan Islam serta pengembangan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel. Selain itu, manajemen yang baik juga harus melibatkan partisipasi dari semua pihak, termasuk guru, siswa, dan masyarakat, sehingga tercipta budaya kerja yang kolaboratif dan saling mendukung. Dengan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih baik.

C. Manfaat Dan Dampak Positif Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam memiliki manfaat yang luas dan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, lembaga pendidikan, dan bangsa secara keseluruhan. Kebijakan yang dikembangkan dengan baik tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan Islam, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki karakter kuat, keterampilan yang relevan, dan kesadaran sosial yang tinggi.¹¹ Berikut ini adalah beberapa manfaat dan dampak positif dari pengembangan kebijakan pendidikan Islam:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam

Salah satu manfaat utama dari pengembangan kebijakan pendidikan Islam adalah peningkatan kualitas pendidikan yang mencakup aspek akademik, moral, dan spiritual. Dengan kebijakan yang tepat, kurikulum yang disusun akan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman, baik dalam aspek ilmu agama maupun ilmu umum. Pendidikan yang berkualitas memungkinkan peserta didik untuk menguasai ilmu yang relevan dengan kebutuhan mereka dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Ini akan memperkuat citra lembaga pendidikan Islam sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada agama tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang luas.

Pengembangan kebijakan yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pengintegrasian teknologi akan memastikan proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. Tenaga pendidik

¹¹ Zuyinatun Najah, 'Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Pondok Pesantren Di Jawa Timur', *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.2 (2022), 100–109 <<https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i2.13948>>.

yang terlatih dan kompeten mampu menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan dan inspiratif bagi peserta didik, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal.

2. Membentuk Generasi dengan Karakter Islami dan Keterampilan yang Relevan

Kebijakan pendidikan Islam yang dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek karakter akan berkontribusi dalam membentuk generasi yang memiliki karakter Islami, seperti jujur, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Karakter yang kuat dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam sangat penting di era modern yang penuh tantangan. Pendidikan karakter yang diperkuat melalui kebijakan ini akan membekali peserta didik dengan nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Selain karakter Islami, kebijakan yang mengakomodasi keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, akan membuat peserta didik siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial yang dinamis.¹² Dengan mengembangkan kebijakan yang memperhatikan keterampilan ini, pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang tidak hanya paham agama tetapi juga memiliki keterampilan yang diperlukan dalam dunia global.

3. Memperkuat Identitas dan Kepercayaan Diri Peserta Didik Muslim

Pendidikan Islam yang berkualitas mampu memberikan identitas yang kuat kepada peserta didik Muslim. Pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang menghargai nilai-nilai keislaman, budaya lokal, dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan akan membantu peserta didik dalam memahami dan menghargai jati diri mereka sebagai Muslim. Identitas yang kuat ini penting untuk menghadapi pengaruh globalisasi yang seringkali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalankan ajaran agama dan berinteraksi dengan lingkungan multikultural juga merupakan dampak positif dari pendidikan Islam yang berorientasi pada penguatan identitas. Dengan identitas yang kuat, peserta didik tidak hanya akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang datang dari luar, tetapi juga akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang baik di masyarakat.

¹² Amin Maghfuri, 'Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004)', *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8.1 (2020), 14–26 <<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614/924>>.

4. Mendorong Inovasi dan Adaptasi terhadap Teknologi di Lembaga Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam yang mencakup pengembangan teknologi akan membawa manfaat besar bagi lembaga pendidikan dalam hal efisiensi dan efektivitas. Teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar serta dalam manajemen pendidikan dapat mempercepat adaptasi lembaga pendidikan Islam terhadap perkembangan zaman. Kebijakan yang mendukung inovasi dan teknologi juga dapat mendorong pemanfaatan e-learning, aplikasi pembelajaran, dan platform digital yang memperkaya pengalaman belajar bagi peserta didik.

Adaptasi terhadap teknologi akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari segi administrasi maupun akademik. Peserta didik juga akan terbiasa dengan teknologi yang membantu mereka mengembangkan keterampilan digital, yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini. Hal ini juga akan membuka peluang bagi pendidikan Islam untuk berperan lebih aktif di ranah digital dan menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat luas.

5. Memperkuat Kerja Sama Antar Lembaga Pendidikan dan Pemangku Kepentingan

Dampak positif lain dari pengembangan kebijakan pendidikan Islam adalah terbentuknya kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan Islam dan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.¹³ Kerja sama ini sangat penting dalam mendukung pendidikan Islam agar dapat berjalan dengan optimal. Kebijakan yang mengatur kolaborasi ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana, pelatihan, dan pertukaran pengalaman.

Kerja sama ini juga memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk terhubung dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri, yang akan membuka kesempatan bagi peningkatan mutu pendidikan melalui program pertukaran pelajar, pelatihan tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang lebih inovatif. Dengan adanya kerja sama ini, pendidikan Islam diharapkan mampu meningkatkan citranya dan menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan nasional.

¹³ Oleh Nanang Nuryanta, 'Abdi,+Volume+VIII+Th+VI+Juni+2003-04-Nuryanta', VIII (2003).

6. Menciptakan Lingkungan Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang berorientasi pada inklusivitas dan keadilan akan memastikan bahwa pendidikan Islam dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, dan geografis. Kebijakan yang inklusif akan membuka peluang pendidikan yang lebih luas, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil dan kurang mampu. Dengan memberikan akses yang setara kepada semua peserta didik, pendidikan Islam dapat menjadi instrumen dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Lingkungan pendidikan yang inklusif juga akan memperkaya pengalaman belajar bagi peserta didik, karena mereka akan belajar untuk saling menghargai dan berempati terhadap perbedaan. Hal ini sangat penting dalam membentuk generasi yang memiliki rasa tanggung jawab sosial dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam.

7. Berkontribusi pada Pembangunan Masyarakat dan Bangsa

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berdampak pada individu peserta didik dan lembaga pendidikan¹⁴, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Pendidikan Islam yang berkualitas akan melahirkan generasi yang memiliki wawasan kebangsaan dan kesadaran sosial yang tinggi, serta memiliki kecintaan terhadap agama dan tanah air. Mereka akan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif di lingkungan masing-masing dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Generasi yang dibentuk melalui pendidikan Islam yang berkualitas akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kemanusiaan yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Mereka juga akan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, serta memberikan sumbangsih dalam berbagai sektor, baik sebagai pemimpin, tenaga profesional, maupun anggota masyarakat yang aktif.

¹⁴ Ade Salamun and Sofyan Sauri, 'Isu Dan Masalah Dalam Analisis Evaluasi Dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.01 (2023), 219–40 <<https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.2859>>.

8. Menguatkan Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Moderasi Beragama

Di tengah meningkatnya isu-isu intoleransi dan ekstremisme, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk moderasi beragama di kalangan peserta didik. Pengembangan kebijakan yang mendukung moderasi beragama akan membantu lembaga pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan berkomitmen pada prinsip keadilan.¹⁵ Hal ini akan menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan yang plural dan damai.

Moderasi beragama adalah fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan dapat mencegah konflik. Dengan adanya kebijakan pendidikan Islam yang berfokus pada moderasi beragama, generasi muda akan belajar untuk menjadi Muslim yang inklusif, terbuka terhadap dialog, dan siap untuk membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan relevansi pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang berkarakter Islami, kompeten, dan mampu bersaing di kancah global. Kebijakan pendidikan Islam yang dinamis diperlukan untuk menghadapi perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan tuntutan keterampilan abad ke-21. Dengan berfokus pada adaptasi kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pendidikan Islam dapat menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual dan spiritual.

Manfaat dari pengembangan kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan karakter Islami pada peserta didik, dan penguatan identitas keislaman. Dampak positif ini tidak hanya berpengaruh pada individu peserta didik tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Pendidikan Islam yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial akan memperkuat

¹⁵ Faisal Mubarak, 'Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia', *Jurnal Ta'lim Muta'allim*, 4.8 (2015), 8 <<https://doi.org/10.18592/tm.v4i8.513>>.

peran pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, moderat, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, pengembangan kebijakan pendidikan Islam adalah upaya yang sangat penting untuk memajukan kualitas pendidikan dan mewujudkan generasi Muslim yang berdaya saing global. Diharapkan bahwa kebijakan yang terus diperbarui dan diimplementasikan secara efektif dapat membawa pendidikan Islam ke arah yang lebih progresif dan relevan, menjadikannya fondasi utama bagi pembangunan karakter bangsa dan penciptaan masyarakat yang adil, damai, serta sejahtera.

REFERENSI

- Ardiansyah, Minnah El Widdah, and Su'aidi, 'Argumen Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 2.1 (2024), 84–93 <<https://doi.org/10.61104/jq.v1i2.135>>
- Djamil, Nasrullah, Khairunnas Rajab, and Helmiati Helmiati, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Negara Yang Dilanda Konflik: Studi Kasus Di Pattani Thailand', *Jurnal EL-RYASAH*, 12.2 (2022), 171 <<https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.15522>>
- haris, 'Kebijakan Pendidikan Islam', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7.November (1967), 14–25
- Hoddin, Muhammad Sholeh, 'Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14.1 (2020), 15
- Jumira Warlizasusi, Hj, MPd -Dr Sumarto, MPdI Ade Wahyu Kurniawan, Affrilia Nafa Sundari, Ana Mawaddah, Babara Susyanto, and others, *Penerbit Buku Literasiologi Kerja Sama Dengan Pascasarjana IAIN Curup Alamat Penerbit* <[www:http://literasikitaindonesia.com](http://literasikitaindonesia.com)>
- Kurikulum, Pengembangan, and Pendidikan Isla, 'Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat 1', *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.2 (2022), 97–111
- Maghfuri, Amin, 'Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004)', *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8.1 (2020), 14–26 <<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614/924>>
- Mubarak, Faisal, 'Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia', *Jurnal Ta'lim*

- Muta'allim*, 4.8 (2015), 8 <<https://doi.org/10.18592/tm.v4i8.513>>
- Nadhif Muhammad Mumtaz, 'Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.2 (2022), 414 <<file:///E:/Kebijakan Pendidikan/kebijakan pendidikan menurut KH. Zenal Arifin.pdf>>
- Najah, Zuyinatun, 'Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Pondok Pesantren Di Jawa Timur', *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.2 (2022), 100–109 <<https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i2.13948>>
- Nuryanta, Oleh Nanang, 'Abdi,+Volume+VIII+Th+VI+Juni+2003-04-Nuryanta', VIII (2003)
- Nuryasin, Muhamad, and Margono Mitrohardjono, 'Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam*, 4.2 (2019), 77–84 <<https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.2.77-84>>
- Pitri, Alisyah, Hapzi Ali, and Kasful Anwar Us, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan)', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2.1 (2022), 23–40 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854>>
- Rifa'i, Moh., 'Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Era Otonomi Daerah', *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.1 (2017), 99–114 <<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i1.31>>
- Salamun, Ade, and Sofyan Sauri, 'Isu Dan Masalah Dalam Analisis Evaluasi Dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.01 (2023), 219–40 <<https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.2859>>